



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN  
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IV DPR RI  
KE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
MASA SIDANG II TAHUN SIDANG 2020-2021  
18-20 November 2020**

\*

\*\*

\*\*\*

\*\*

\*

**JAKARTA 2020**



**LAPORAN**  
**KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IV DPR RI**  
**KE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**MASA SIDANG II TAHUN SIDANG 2020-2021**  
**18-20 November 2020**

## **1. PENDAHULUAN**

### **A. DASAR KUNJUNGAN KERJA**

Dasar hukum yang dipergunakan dalam melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah:

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib:
  - Pasal 58 ayat 3.d.: Tugas komisi dalam bidang pengawasan adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.
  - Pasal 58 ayat 4: Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana ayat 3 dapat mengadakan kunjungan kerja.
2. Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 5 Oktober 2020.
3. Keputusan Rapat Intern Komisi IV DPR RI tanggal 10 November 2020.

### **B. RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah di sektor lingkungan hidup dan kehutanan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pokok DPR RI.

### **C. TUJUAN**

Maksud dan tujuan dari Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah untuk:

1. Melihat secara langsung progres pembangunan sarana dan prasarana Wisata Alam Loh Buaya di Pulau Rinca, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Mendapatkan informasi secara langsung mengenai permasalahan dalam pembangunan sarana dan prasarana Wisata Alam Loh Buaya di Pulau Rinca, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Mendapatkan informasi secara langsung mengenai permasalahan pengelolaan wisata alam di Taman Nasional Komodo, Provinsi Nusa Tenggara Timur; serta
4. Mendapatkan informasi mengenai alternatif penyelesaian permasalahan pengelolaan wisata alam di Taman Nasional Komodo, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

### **D. SUSUNAN TIM**

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Provinsi Nusa Tenggara Timur dipimpin oleh H. Dedi Mulyadi, S.H. dengan Anggota Tim sebagaimana terlampir.

### **E. PELAKSANAAN DAN LOKASI KUNJUNGAN**

Kunjungan kerja spesifik dilaksanakan pada tanggal 18-20 November 2020. Kunjungan Kerja Spesifik dilakukan ke Lokasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Alam Loh Buaya di Pulau Rinca, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

### **F. GAMBARAN UMUM**

#### **1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Alam Loh Buaya di Pulau Rinca**

Indonesia memiliki kekayaan keanekaragaman hayati yang memiliki nilai sangat tinggi, baik di darat maupun di perairan (laut). Untuk melindungi keanekaragaman hayati yang bernilai tinggi tersebut, Pemerintah Indonesia

menetapkan kawasan konservasi berupa Taman Nasional, Suaka Margasatwa, dan Cagar Alam.

Walaupun telah ditetapkan menjadi kawasan konservasi, potensi pengembangan untuk memperoleh manfaat bagi masyarakat berupa jasa lingkungan masih sangatlah besar. Salah satu manfaat jasa lingkungan yang dapat diperoleh adalah pengembangan kawasan hutan untuk wisata alam. Wisata Alam merupakan salah satu sektor unggulan nasional yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, bahkan beberapa kawasan Taman Nasional (TN) telah dikenal sebagai kawasan wisata alam yang menjadi icon Indonesia, seperti TN Bromo Tengger Semeru, TN Komodo, dan TN Tanjung Putting.

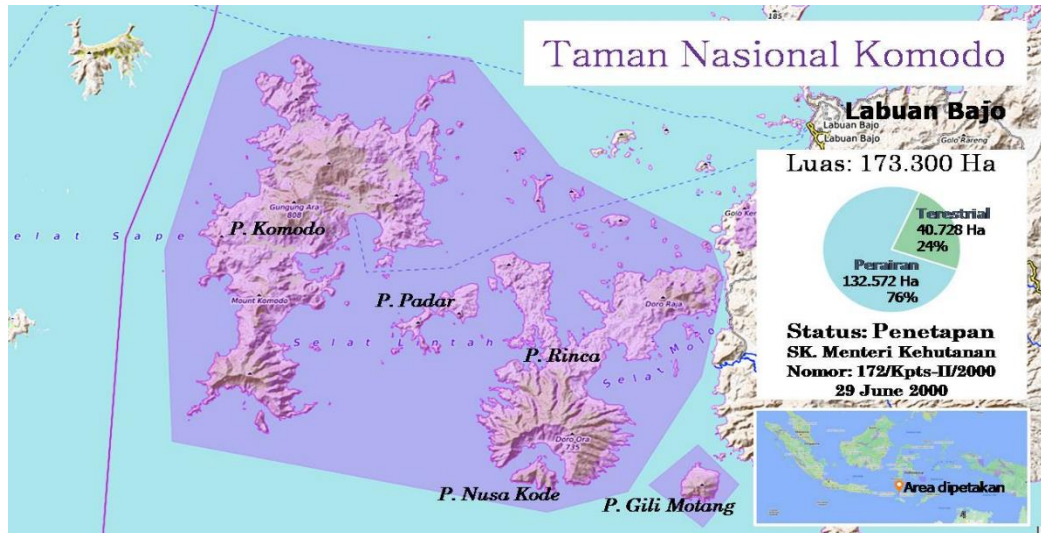
Dasar hukum pengembangan wisata alam yang sesuai dengan prinsip kelestarian adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, di mana kegiatan pemanfaatan kawasan hutan tersebut diarahkan bukan pada kegiatan eksploitasi melainkan lebih kepada pengembangan pemenuhan jasa pariwisata alam. Potensi wisata alam di kawasan hutan dengan daya tariknya yang tinggi merupakan potensi yang bernilai jual tinggi sebagai obyek wisata, sehingga pariwisata alam di kawasan hutan layak untuk dikembangkan.

Potensi keanekaragaman hayati dan ekosistem Taman Nasional yang kaya perlu dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, perlu dijaga kelestariannya, dan dikelola dengan prinsip “3P” (Perlindungan sistem penyangga kehidupan, Pengawetan sumber plasma nutfah, serta Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya).

Beberapa waktu terakhir kita dihebohkan dengan berita terkait pembangunan sarana dan prasarana Wisata Alam Loh Buaya di Pulau Rinca, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang merupakan bagian wilayah kerja Taman Nasional (TN) Komodo, suatu Unit Pelaksana Tugas (UPT) di bawah Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Banyak pihak telah menyampaikan pendapatnya atas

dilaksanakannya pembangunan proyek wisata alam nasional ini, baik dalam bentuk dukungan ataupun penolakan.

## TN. Wisata Alam Komodo

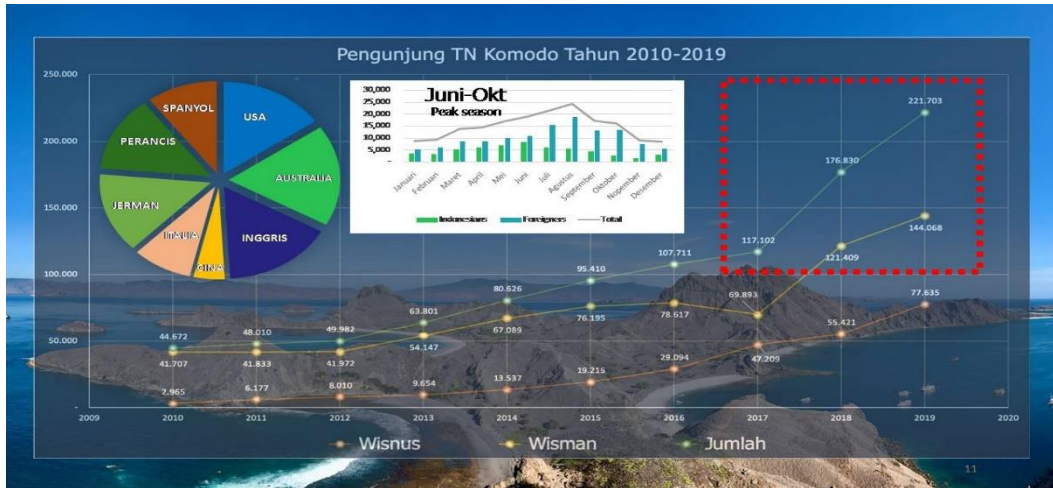


## Zonasi TN. Komodo

### ZONASI TN KOMODO TAHUN 2001, 2012 DAN 2020

No	Zona	Tahun 2001 (Ha)	Tahun 2012 (Ha)	Tahun 2020		Keterangan
				Ha	%	
1.	Zona Inti	31.257,94	34.311	34.305	19,80	erlindungan satwa dan habitat Komodo (termasuk satwa endemik lainnya)
2.	Zona Rimba	23.529,58	22.187	22.192	12,81	Mendukung pelestarian Zona Inti dan Zona Pemanfaatan
3.	Zona Perlindungan Bahari	34.612,20	36.308	36.308	20,95	Perlindungan jenis tumbuhan, satwa dan ekosistem serta sistem penyangga kehidupan.
4.	Zona Pemanfaatan (Darat)	1.658,35	824	2.408	1,39	Untuk kepentingan pariwisata alam dan kondisi lingkungan lainnya.
5.	Zona Pemanfaatan (Perairan)	1.658,35	1.584			
6.	Zona Tradisional (Darat)	1.112,59	879	36.308	20,95	Kepentingan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat yang secara turun-temurun mempunyai ketergantungan dengan TN Komodo
7.	Zona Tradisional (Perairan)	15.878,81	17.308			
8.	Zona Pemanfaatan Khusus Penelitian dan Pendidikan	1.146,21	-	-	-	-
9.	Zona Pemanfaatan Khusus Tradisional (Pelagis)	62.568,68	59.601	59.601	34,39	Pemukiman kelompok masyarakat dan aktivitas kehidupannya dan/atau bagi kepentingan pembangunan sarana tele-komunikasi dan listrik, fasilitas transportasi dan lain-lain yang bersifat Strategis.
10.	Zona Khusus	373,99	298	313	0,18	
<b>Jumlah</b>		<b>173.300</b>	<b>173.300</b>	<b>173.300</b>	<b>100</b>	<b>8</b>

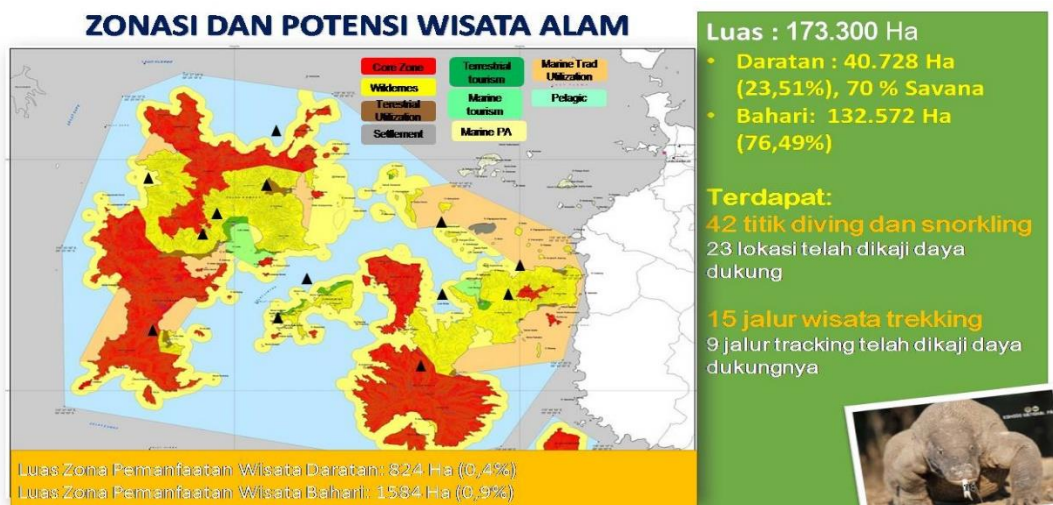
## Pengunjung TN. Komodo



## Statistic PNBP TN. Komodo

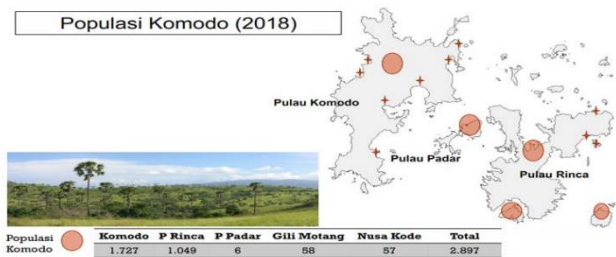


## Potensi Wisata Alam



## Populasi Komodo

Populasi Komodo (2018)



**Karakter Ekosistem yang semi arid dengan 70% adalah savana kurang sensitif, sehingga tidak bisa disamakan dengan ekosistem hutan hujan tropis yang sangat sensitif.**

**Penting fokus pada habitat, ketersediaan pakan (rusa, kerbau), jalur jelajah sarang ke areal berjemur, areal pendinginan, dan mencari mangsa.**

**Populasi komodo di Lembah Loh Buaya relatif stabil, bahkan meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Total jumlah biawak komodo pada 2018 sebanyak 2.897 individu dan pada tahun 2019 bertambah menjadi 3.022 individu (bertambah 125 individu). Konsentrasi populasinya berada di Pulau Komodo dan Pulau Rinca. Hanya sebanyak 7 individu di Pulau Padar, 69 individu di Gili Motang, dan 91 individu di Nusa Kode.**

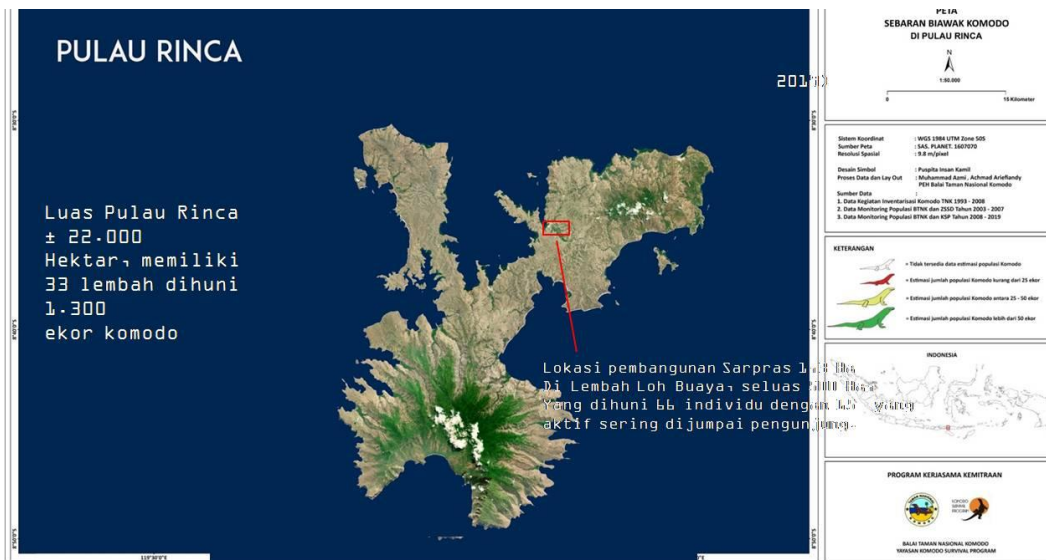
**Populasi biawak komodo di Lembah Loh Buaya adalah 5% populasi di Pulau Rinca atau sekitar 66 ekor. Bahkan populasi biawak komodo di Lembah Loh Buaya selama 17 tahun terakhir relatif stabil dengan kecenderungan sedikit meningkat di 5 tahun terakhir**

## Sebaran Biawak Komodo

Hasil Kajian Komodo Survival Program dan BBKSDA NTT bahwa Biawak Komodo tidak hanya ada di TN Komodo tapi juga ada 3 tempat lain di Pulau Flores yaitu di Pesisir Barat Pulau Flores, di Pulau Longos dan di Pesisir Utara Pulau Flores



## Pembangunan Sarana dan Prasarana Loh Buaya di Pulau Rinca





**Kegiatan Penataan Sarana dan Prasarana**



**Dermaga Lama**

**Kegiatan penataan sarpras**  
 Dermaga Loh Buaya, Pengaman Pantai, Evelated Deck, Pusat Informasi, Pondok Ranger/ Peneliti/ pemandu, berada pada lokasi sarpras yang lama



**Dermaga Baru**





## DERMAGA



Panjang darmaga <400 m

Dermaga terinspirasi dari bentuk fisik komodo yang kuat dan keunikan lidahnya yang bercabang; artwork Komodo menjadi elemen penerima kedatangan tamu / peneliti



## PUSAT INFORMASI

Pada bagian atas bangunan ini dilengkapi ramp dan aneka *Selfie Spot* untuk dinikmati para wisatawan



Keterangan:

— Jalur Jelajah 15 Individu Komodo

## MAPPING PROJECT

## Izin Lingkungan dan *Environmental Impact Assessment*

- Penataan kawasan Loh Buaya di Pulau Rinca sudah melalui proses yang cukup panjang dengan melibatkan beberapa ahli di bidangnya.
- Dasar pembangunan/penataan sarana prasarana di Loh Buaya Pulau Rinca TN Komodo adalah PKS antara Ditjen KSDAE KLHK dengan Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Sumber Daya Air KemenPUPR tanggal 15 Juli 2020.
- Izin Lingkungan Hidup telah terbit pada tanggal 4 September 2020 (Keputusan Kepala DPMPSTSP Provinsi NTT Nomor DPMPSTSP.669/32/PTSP/IX/2020)
- Terkait dengan status TN Komodo sebagai Kawasan Warisan Dunia (Natural World Heritage Site), Pemerintah Indonesia telah melaksanakan kewajiban yaitu menyusun Environmental Impact Assesment (EIA) sesuai Advice Note IUCN.
- Dokumen EIA disampaikan kepada UNESCO dalam rangka menjaga peran TN Komodo sebagai *World Heritage* yang memiliki *Outstanding Universal Value (OUV)* surat disampaikan oleh Executive Chairman dengan Nomor: 102660/A6/KS/2020 tanggal 23 Oktober 2020.

## 2. Pembangunan Insinerator Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat

### a. Gambaran Limbah B3 Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Limbah Medis Fasyankes) di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Total volume limbah medis di 50 Fasyankes adalah sebanyak 1.210,89 kg/hari, dengan wilayah sebaran:

- 1) Wilayah Satu Flores: Belu, Malaka, Timor Tengah Utara, Timor Tengah Selatan, Kupang, Kota Kupang, Sabu, Raijua, Rote Ndao, dan Alor, dengan jumlah Fasyankes sebanyak 27 unit dan volume sebanyak 683,63 m<sup>3</sup>.
- 2) Wilayah Dua Flores: Lembata, Flotim, Sika, Ende, Nagekeo, Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat, dengan jumlah Fasyankes sebanyak 26 unit dan dengan volume sebanyak 368,26 m<sup>3</sup>.
- 3) Wilayah Tiga Sumba: Sumba Barat Daya, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Timur, jumlah Fasyankes sebanyak 7 unit dan volume sebanyak 164 m<sup>3</sup>.

### b. Gambaran Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 Fasyankes di Provinsi Nusa Tenggara Timur

- 1) Lokasi pembangunan di Desa Nggorong, Kec. Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Prov. Nusa Tenggara Timur.
- 2) Waktu Pelaksanaan Pekerjaan.

- a) Rumah Pelindung (Shelter) : 14 Agustus s.d. 27 Nov. 2020.
- b) Incinerator : 23 Juli s.d. 30 Nov 2020.
- 3) Shelter, sudah selesai dibangun tanggal 13 November 2020, dengan luas lahan 18 m x 22 m yang dilengkapi dengan kantor.
- 4) Insinerator, kapasitas 150 kg/jam: terdiri dari dua ruang bakar dengan suhu minimal suhu bakar:
  - ✓ ruang 1 : 800°C
  - ✓ ruang 2 : 1.200°C

## G. HASIL KUNJUNGAN KERJA

### 1. Permasalahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Alam Loh Buaya di Pulau Rinca, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur

- a. Beberapa masukan dan informasi yang telah berhasil dihimpun saat pelaksanaan kunjungan kerja tersebut di atas, diantaranya adalah adanya keinginan masyarakat di dalam Kawasan TN Komodo atas:
  - 1) Pengelolaan wisata alam di TN Komodo yang terus memperhatikan azas konservasi serta tetap memegang prinsip perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan sumber plasma nutfah, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
  - 2) Akses dan kesempatan bagi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan TN Komodo untuk ikut serta dalam pengelolaan wisata alam, mengingat adanya istilah **Wisata Premium** yang dikhawatirkan akan menggeser masyarakat lokal di Kabupaten Manggarai Barat.
  - 3) Dilaksanakannya program pemberdayaan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar dapat berperan serta dalam kegiatan operasional wisata alam di TN Komodo, termasuk di dalamnya sebagai operator wisata alam dan pengembangan kerajinan tangan berbasis kearifan lokal.
  - 4) Diperolehnya perimbangan yang adil dalam pembagian manfaat (Penerimaan Negara Bukan Pajak - PNBP) atas pengelolaan wisata alam di TN Komodo.

- 5) Diperolehnya bantuan dalam hal penyediaan fasilitas air bersih, sarana dan prasarana transportasi, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan rumah sakit, penyediaan sarana pendidikan, serta penyediaan sarana peribadatan.
- b. Selanjutnya Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta para pemegang kepentingan (*stake holder*) terkait pengelolaan wisata alam di Taman Nasional Komodo, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**Rekomendasi:**

- a. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melaksanakan pengelolaan wisata alam di Taman Nasional Komodo serta seluruh Taman Nasional lainnya di seluruh Indonesia dengan terus memperhatikan azas konservasi serta tetap memegang prinsip perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan sumber plasma nutfah, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- b. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melaksanakan program pemberdayaan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di dalam dan di sekitar kawasan Taman Nasional di seluruh Indonesia sehingga dapat berperan serta dalam kegiatan operasional wisata alam, termasuk di dalamnya sebagai operator wisata alam dan pengembangan kerajinan tangan berbasis kearifan lokal.
- c. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga negara terkait dalam mengatur kebijakan perimbangan yang adil dalam pembagian manfaat (Penerimaan Negara Bukan Pajak - PNBP) atas pengelolaan wisata alam di dalam kawasan Taman Nasional.
- d. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga negara terkait dalam memenuhi permintaan masyarakat

di dalam kawasan Taman Nasional Komodo untuk mendapatkan bantuan penyediaan fasilitas air bersih, fasilitas pelayanan kesehatan dan rumah sakit, penyediaan sarana dan prasarana transportasi, penyediaan sarana pendidikan, serta penyediaan sarana peribadatan.

## **2. Pembangunan Insinerator Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat**

- a. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk meningkatkan anggaran pada Direktorat Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya dalam rangka menanggulangi kebutuhan pelayanan pengolahan limbah B3 Fasyankes.
- b. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar mendorong sektor swasta untuk melakukan investasi dan berusaha dalam kegiatan pengolahan limbah B3, terutama Limbah B3 Fasyankes di Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk menanggulangi kebutuhan pelayanan pengolahan limbah B3 Fasyankes yang saat ini masih sangat rendah pemenuhan pelayanannya oleh Pemerintah, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.

## **H. KESIMPULAN**

1. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melaksanakan pengelolaan wisata alam di Taman Nasional Komodo serta seluruh Taman Nasional lainnya di seluruh Indonesia dengan terus memperhatikan azas konservasi serta tetap memegang prinsip perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan sumber plasma nutfah, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
2. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melaksanakan program pemberdayaan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di dalam dan di sekitar kawasan Taman Nasional di seluruh Indonesia sehingga dapat berperan serta dalam kegiatan operasional wisata alam, termasuk di dalamnya

sebagai operator wisata alam dan pengembangan kerajinan tangan berbasis kearifan lokal.

3. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga negara terkait dalam mengatur kebijakan perimbangan yang adil dalam pembagian manfaat (Penerimaan Negara Bukan Pajak - PNBP) atas pengelolaan wisata alam di dalam kawasan Taman Nasional.
4. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga negara terkait dalam memenuhi permintaan masyarakat di dalam kawasan Taman Nasional Komodo untuk mendapatkan bantuan penyediaan fasilitas air bersih, fasilitas pelayanan kesehatan dan rumah sakit, penyediaan sarana dan prasarana transportasi, penyediaan sarana pendidikan, serta penyediaan sarana peribadatan.
5. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk meningkatkan anggaran pada Direktorat Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya dalam rangka menanggulangi kebutuhan pelayanan pengolahan limbah B3 Fasyankes.
6. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar mendorong sektor swasta untuk melakukan investasi dan berusaha dalam kegiatan pengolahan limbah B3, terutama Limbah B3 Fasyankes di Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk menanggulangi kebutuhan pelayanan pengolahan limbah B3 Fasyankes yang saat ini masih sangat rendah pemenuhan pelayanannya oleh Pemerintah, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.

## **I. PENUTUP**

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan menindaklanjuti aspirasi dari beberapa pihak dalam Rapat Kerja maupun Rapat Dengar Pendapat bersama Mitra Kerja Komisi IV DPR RI. Semoga kunjungan kerja ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Jakarta, 23 November 2020

Ketua Tim,

Ttd.

**H. Dedi Mulyadi**

A-294

## LAMPIRAN DOKUMENTASI



Gambar Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI  
ke Taman Nasional Komodi  
Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat



Gambar Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI  
ke Lokasi Pembangunan Insinerator  
Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat

## LAMPIRAN MEDIA YANG MELIPUT

<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30809/t/Pembangunan+Kawasan+Wisata+Komodo+Harus+Berbasis+Konservasi>

<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30790/t/javascript;>

<https://jabar.tribunnews.com/2020/11/24/dedi-mulyadi-wisata-premium-di-pulau-komodo-bikin-warga-asli-khawatir-ini-solusi-dari-dpr-ri?page=all>

<https://nasional.kompas.com/read/2020/11/23/12380981/komisi-iv-usulkan-anak-anak-di-labuan-bajo-bisa-sekolah-pariwisata-gratis>

<https://www.sidaknusanantara.com/2020/11/24/wakil-kerua-komisi-iv-dpr-ri-dedi-mulyadi-meninjau-kawasan-strategis-pariwisata-nasional-kspn-labuan-bajo/>

<https://www.pu.go.id/berita/view/19053/komisi-iv-tekankan-pembangunan-sarana-dan-prasarana-di-pulau-rinca-tetap-perhatikan-konservasi-lingkungan>

<https://www.antaranews.com/berita/1855700/dedi-mulyadi-alokasikan-pnbp-pulau-komodo-untuk-pengembangan-daerah>